

POLA AKSES PETANI PENGGARAP LAHAN DI KAWASAN PERLUASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO JAWA BARAT

(Access Pattern of Local Community in Expansion Area of Gunung Gede Pangrango National Park West Java)

ARIEF SUDHARTONO¹, SAMBAS BASUNI², BAHRUNI³ DAN DIDIK SUHARJITO³

¹*Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Kampus Darmaga Bogor 16680, Indonesia*

²*Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia*

³*Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus Dramaga, Bogor 16680 Indonesia*

Diterima 10 November 2011/Disetujui 28 November 2011

ABSTRACT

Nature resource utilization by local peoples around the resource have been part of Indonesian culture, occurring at many places, for instance in expansion area of Gunung Gede Pangrango National Park (TNGGP). Research was directed to describe the access pattern (way of getting access and access utilization forms) in frame on formulating model and strategy of restoration activities implementation. Research result shown that community access interrelated with history of this area management and dependency of land user to forest resources that is influenced by land property factor, agronomic culture, and local institution; also shown that there are 2 (two) types of community access goals i.e. non woody forest product harvesting and forest land using as agronomic activity that can be differenced into 5 sub-types utilization forms base on kind of commodities (main food, horticulture, trees, Multi Purpose Tree specieses, and medicinal crop); 3 sub-tipes base on time scale of commodities production (seasonal, annual, perenial); and 4 sub-tipes based on agronomic pattern (agronomic system base), i.e: vegetable base, rice-horticulture base, casava-banana base, and agroforestry. Finding 5 kind of access patterns of community to gain access on forest land i.e: land distribution pattern, self-community inisiative pattern, inheritance pattern, compensation cost pattern, and pawning/rental pattern. Necessarily to formulate institution for ensuring restoration object and community access.

Keywords: access, conflict, Gede Pangrango National Park, forest resource, restoration.

PENDAHULUAN

Perkembangan luas kawasan hutan konservasi di Indonesia sangat signifikan. Tahun 2003 terdapat mutasi hutan produksi terbatas menjadi kawasan konservasi seluas 40.156,75 Ha disusul tahun 2004 seluas 50.299,81 Ha (Departemen Kehutanan 2009). Tujuan penetapan kawasan pelestarian alam atau kawasan konservasi adalah untuk perlindungan dan pengawetan sumberdaya alam (SDA) guna menjamin kelestarian pemanfaatan SDA hayati dan keseimbangan ekosistemnya untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia (Pasal 3 UU Nomor 5 tahun 1990). Dengan SK Menteri Kehutanan No. 174/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003 terjadi perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) 7.081,76 ha berasal dari eks kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas Perum Perhutani yang perlu direstorasi sebagai konsekuensi penetapan kawasan konservasi untuk memulihkan fungsinya (Basuni 2003, Balai TNGGP 2004). Perluasan kawasan TNGGP tersebut berakibat pada perubahan status fungsi kawasan dan pemanfaatan lahan yang lebih ketat, serta pilihan tindakan manajemen yang tidak seluas pada manajemen sumberdaya hutan (SDH) saat dikelola Perum Perhutani. Munculnya SK Menteri Kehutanan No

174/2003 tersebut menyebabkan masyarakat (khususnya petani penggarap lahan eks program PHBM⁴ - Perum Perhutani) kehilangan akses atas pemanfaatan sumberdaya lahan (SDL) yang selama ini menjadi gantungan penghidupan mereka.

Berdasarkan UU No 5 tahun 1990 dalam kawasan konservasi dilarang adanya kegiatan pertanian dan kegiatan pemungutan hasil hutan (khususnya hasil hutan kayu). Hal ini memunculkan konflik kepentingan atas SDL di dalam kawasan perluasan TNGGP antara masyarakat (petani penggarap lahan) dengan pemerintah yakni Balai Besar TNGGP (BBTNGGP) akibat perbedaan persepsi atas SDA kawasan perluasan TNGGP. Masyarakat mengklaim karena merasa mempunyai hak atas lahan kawasan perluasan dan tanaman yang ada di atasnya. Sementara itu BBTNGGP memandang SDH dan lahan dari aspek *property rights* dimana lahan hutan kawasan perluasan TNGGP adalah milik negara (*state property*). Fakta semakin banyaknya jumlah petani penggarap yang ada di dalam kawasan perluasan TNGGP meskipun diketahui bahwa status fungsi kawasan telah berubah menunjukkan adanya sistem akses dan usaha masyarakat mempertahankan akses atas SDL didalam kawasan perluasan TNGGP di tengah konflik yang ada. Dari pembelajaran restorasi

*Penulis untuk korespondensi, email: arief_hutan@yahoo.com, Telp. +62-85959150655

yang dilakukan BBTNGGP dapat dikemukakan bahwa salah satu akar masalah penting terkait dengan restorasi kawasan perluasan TNGGP adalah masalah tercabutnya hak akses masyarakat atas kawasan.

Berdasarkan pokok pemikiran di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan pokok untuk mendeskripsikan pola akses masyarakat petani penggarap lahan yang menggambarkan cara masyarakat mendapatkan akses lahan dan bentuk penggunaan akses tersebut dalam rangka penyusunan pendekatan dan strategi pelaksanaan kegiatan restorasi. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini mencakup pendeskripsian: 1) akses sebelum dan sesudah penetapan perluasan kawasan TNGGP, 2) penguasaan lahan usaha pertanian dan ketergantungan masyarakat atas lahan garapan di dalam kawasan hutan, 3) jenis pekerjaan masyarakat penggarap, 4) tipe akses masyarakat, dan 5) pola akses masyarakat atas lahan garapan di dalam kawasan TNGGP.

METODE PENELITIAN

Teori utama yang dijadikan landasan untuk menganalisis dan menjelaskan fenomena penggarapan lahan dan pemanfaatan SDA di kawasan perluasan TNGGP adalah teori akses dari Ribot dan Peluso (2003). Teori akses menjelaskan bagaimana masyarakat dapat mengakses kawasan, tipe-tipe akses, dan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat sehingga mereka memperoleh akses. Dapat juga dikatakan bahwa teori akses membahas tentang bagaimana cara masyarakat berinteraksi dengan SDA yang ada di sekitarnya dalam rangka mendapatkan benefit dari SDA tersebut dengan menekankan peranan kekuasaan tanpa memperhatikan *property rights*, sebagaimana Ribot dan Peluso (2003) menyatakan bahwa *access as the ability to derive benefits from things, including material objects, persons, institutions, and symbols*. Penggarapan lahan dan pemungutan hasil hutan oleh masyarakat di sekitar kawasan perluasan TNGGP merupakan bentuk akses.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat paparan kualitatif dan kuantitatif untuk menggambarkan hal-hal yang ditanyakan dalam penelitian. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Umar 2002; Hasan 2002).

Penelitian dilaksanakan di kawasan perluasan TNGGP, yang secara administratif (Balai Besar TNGGP 2009) mencakup tiga wilayah Kabupaten (Bogor, Cianjur, Sukabumi) Provinsi Jawa Barat. Penelitian dilaksanakan selama enam bulan tahun 2010/2011.

Penentuan wilayah sampel (sebanyak enam Resort PTN⁵) dilakukan dengan metode *cluster sampling* dimana populasi (kawasan perluasan TNGGP) dibagi menjadi beberapa *cluster*. Pembagian *cluster* didasarkan pada bidang PTN, jenis lahan garapan, komoditas

pertanian, dan jenis tegakan hutan/tutupan lahan hutan. Responden petani penggarap diambil dari 6 (enam) desa lokasi kawasan perluasan sebanyak 10 orang per desa (berasal dari satu blok lokasi kegiatan restorasi/rehabilitasi yang ada di tiap desa, total 60 responden) dilakukan dengan metode *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan jumlah petani penggarap dan jenis lahan garapan (Lampiran 1). Intensitas sampling terhitung rata-rata 16% dengan kisaran 9-29%. (Lampiran 2)

Data primer langsung diperoleh di lapangan menggunakan teknik observasi dan wawancara/kuesioner (Singarimbun dan Effendi 1995). Data yang dikumpulkan meliputi data kondisi ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan kelembagaan masyarakat. Data sekunder diperoleh dari kajian terhadap laporan hasil penelitian dan kegiatan di lokasi penelitian, publikasi ilmiah, peraturan perundangan dan turunannya, instansi terkait (pemerintah, swasta, LSM) yang digunakan sebagai pelengkap/penguat data primer dalam analisis. Kajian terhadap peraturan perundangan dan fakta lapangan digunakan untuk menjelaskan bagaimana cara akses masyarakat atas lahan kawasan perluasan TNGGP, alasan akses dan bagaimana sikap dan perilaku masyarakat dalam usaha mempertahankan aksesnya.

Wawancara dilakukan terhadap informan yang didapatkan melalui metode bola salju (*snowball*), terdiri atas petani penggarap, tokoh masyarakat, pegawai, dan petugas BBTNGGP. Pelaksanaan wawancara kepada petani penggarap digunakan pembantu peneliti (berpendidikan SLA/ sederajat dan/atau tokoh masyarakat) yang berfungsi untuk mengatasi hambatan psikologis dan untuk menerjemahkan isi wawancara kedalam bahasa Sunda sehingga informasi yang diharapkan dari tujuan wawancara benar-benar dipahami oleh petani penggarap.

Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif (kualitatif dan kuantitatif) dan metode skoring dan kategorisasi yang diolah dengan menggunakan program Microsoft Excell 2007. Asumsi dan standar skor serta penentuan kelas kategori yang digunakan bervariasi menurut variabel dan komponen yang terkait dengan akses atas lahan hutan.

Variabel akses yang dianalisis mencakup:

Luasan penguasaan lahan usaha tani di luar kawasan hutan meliputi penguasaan lahan sawah dan atau tegal. Penguasaan lahan mencerminkan keterkaitan hubungannya dengan akses petani penggarap ke dalam kawasan hutan karena luas atau sempitnya penguasaan lahan menunjukkan kecukupan luasan lahan yang dipunyai oleh petani penggarap guna memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkorelasi dengan tingkat ketergantungan petani penggarap atas lahan hutan.

Standar penguasaan lahan sawah petani di pulau Jawa untuk memenuhi kebutuhannya adalah 0,7 Ha/KK petani, sejalan dengan hasil penelitian Gaol (2011) di daerah Deli Serdang Sumatera Utara sebesar 0,66 Ha.

Pembobotan jenis lahan (sawah dan tegal) perlu dilakukan untuk menentukan standar skor kecukupan penguasaan lahan. Dengan asumsi bahwa produktivitas lahan sawah hampir 1,5 kali lipat dibandingkan produktivitas lahan tegal maka diperoleh angka kecukupan luas lahan tegal adalah 1 (satu) Ha/KK petani. Skoring menggunakan skala Likert (1-5). Standar skoring dan kategori kecukupan penguasaan lahan tertuang dalam Lampiran 3.

Tingkat ketergantungan petani penggarap terhadap lahan hutan menurut luas penguasaan lahan diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu kategori *Sangat Tergantung* (Tinggi) jika nilai skor > 2, kategori *Cukup Tergantung* (Sedang) jika nilai skor = 2, dan kategori *Kurang Tergantung* (Rendah) jika nilai skor < 2.

Jenis pekerjaan (mencakup pekerjaan pokok dan sampingan) merupakan variabel akses karena mencerminkan keterkaitan hubungannya dengan akses petani penggarap ke dalam kawasan hutan. Jenis pekerjaan menunjukkan keeratan keterkaitan dengan kebutuhan lahan dan menunjukkan tinggi rendahnya tingkat ketergantungan petani penggarap terhadap lahan hutan. Skoring menggunakan skala Likert (1-5) sebagaimana tertuang dalam Lampiran 4. Tingkat ketergantungan jenis pekerjaan terhadap lahan diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu kategori *Sangat Tergantung pada lahan* jika nilai skor > 3; kategori *Cukup Tergantung pada lahan* jika nilai skor = 3 dan kategori *Tidak Tergantung pada lahan* jika nilai skor < 3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akses sebelum dan sesudah penetapan perluasan kawasan taman nasional

Konflik kepentingan atas SDA/SDH sering diawali oleh persepsi, yang kemudian diikuti oleh pemanfaatan dan tekanan atas SDA/SDH tersebut. Persepsi masyarakat akan potensi SDA termasuk SDH dan lahan yang terdapat di dalam dan di sekitar kawasan TNGGP saat ini masih berorientasi pada nilai ekonomis seperti dalam bentuk pemanfaatan lahan hutan dan pemungutan hasil hutan untuk mendapatkan sumber pendapatan. Tujuan pengelolaan SDA sebagaimana amanah UUD 1945 Pasal 33 dan juga tujuan konservasi SDA hayati dan ekosistemnya sebagaimana tertuang dalam UU No 5 tahun 1990 pasal 3 adalah untuk mendukung usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Hal ini disadari oleh Perum Perhutani selaku pengelola kawasan sebelumnya dan merangkul masyarakat untuk ikut terlibat sebagai pemain dalam pengelolaan SDA ke dalam bentuk program 'PHBM-Perum Perhutani' guna mencapai tujuan pengelolaan kawasan. Melalui program ini masyarakat mendapatkan lahan garapan di dalam kawasan hutan dengan kewajiban mentaati aturan yang ditetapkan oleh pengelola. Penggarapan lahan di dalam kawasan

perluasan TNGGP oleh masyarakat merupakan bentuk akses masyarakat ke dalam SDA yang secara normatif kepemilikan SDA tersebut dimiliki oleh negara (*state property*).

Pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat tidak didukung dengan landasan hak kepemilikan lahan (*land rights*) yang kuat. Hak kepemilikan lahan masih dikuasai negara sehingga landasan masyarakat dalam pemanfaatan lahan di dalam kawasan hutan lebih bertumpu pada kapasitas akses. Dengan demikian ragam kebebasan petani penggarap dalam pemanfaatan SDL dibatasi oleh pemegang hak (*property rights*) yaitu Perum Perhutani atas nama negara selaku pemegang hak.

Kebijakan perluasan TNGGP (SK Menhut no 174/2003 pada tahun 2003) menyebabkan masyarakat khususnya petani penggarap eks program PHBM-Perum Perhutani kehilangan akses atas pemanfaatan SDL yang selama ini menjadi tempat bergantung untuk mendukung kebutuhan hidupnya. Kebijakan perluasan tersebut berimplikasi pada perubahan fungsi kawasan hutan dan pemanfaatan lahan yang lebih ketat, serta pilihan tindakan manajemen yang tidak seluas pada manajemen SDH yang dikelola Perum Perhutani. Dengan perubahan status lahan menjadi kawasan konservasi (taman nasional), maka menurut peraturan perundangan yang berlaku menegaskan larangan keberadaan kegiatan yang dapat mengancam keutuhan kawasan dan larangan atas kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, termasuk kegiatan pertanian.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa jumlah penggarap meningkat 2-3 kali lipat dibandingkan data yang terekam tahun 2009. Pertambahan jumlah penggarap ini tidak tercatat secara resmi oleh petugas TNGGP. Terkait dengan tingkat kesiapan petani untuk meninggalkan garapan menunjukkan bahwa 32% masyarakat menyatakan *Belum Siap* meninggalkan lahan garapan dan 25% *Menolak* untuk keluar dari lahan garapan dan ingin tetap menggarap lahan garapan selamanya. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa dari mereka yang *bersedia keluar* dalam waktu dekat (sebanyak 25%) dan yang sudah menyatakan diri *Keluar* dari lahan garapan (sebanyak 18%) ternyata sebagian besar masih mempertahankan akses lahan garapan dengan mengubah pola pertanian mereka melalui perubahan jenis tanaman yang diusahakan yaitu berupa tanaman MPTs (*Multi Purpose Tree species*) dan tanaman obat. Petani bersedia keluar dengan berat hati karena takut dengan aturan perundangan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat berusaha mempertahankan akses lahan garapan karena desakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terkait dengan akses, hasil observasi lapangan ternyata masih ditemukan adanya usaha terselubung dari petani penggarap dalam mempertahankan akses lahan garapan. Bentuk usaha terselubung tersebut berupa gangguan diam-diam terhadap kelangsungan hidup tanaman restorasi dan rehabilitasi yang ada di lahan

garapan mereka antara lain berbentuk kegiatan menanam tanaman pertanian pada jarak ke tanaman pokok yang lebih pendek dari jarak yang ditetapkan oleh pengelola, kegiatan panen hasil pertanian (singkong) pada malam hari sehingga berpeluang untuk terjadinya kerusakan pada tanaman pokok, kegiatan pruning terhadap tanaman kehutanan yang ada di dalam dan di sekitar lokasi garapan sehingga tajuk pohon berbentuk *silindris jarang* dan secara keseluruhan tidak dapat terbentuk kesatuan tajuk tegakan.

Mengingat di satu sisi kawasan perluasan memerlukan restorasi, sementara pada sisi lain masyarakat juga ingin mempertahankan aksesnya terhadap kawasan perluasan tersebut, maka implikasinya diperlukan bentuk pendekatan dan strategi pelaksanaan kegiatan restorasi yang tepat agar kedua kepentingan tersebut dapat berjalan dengan baik. Terkait dengan hal itu, manajemen BBTNGGP telah melakukan beberapa model pendekatan dalam pelaksanaan kegiatan restorasi antara lain melalui program RHL/Gerhan, RHL Partisipatif, dan Adopsi Pohon (BBTNGGP 2009), ternyata hasilnya belum memuaskan. Pendekatan terakhir yang juga dilakukan adalah RHL Konservasi (mulai tahun 2011) namun hasilnya juga belum dapat dilihat. Dari pembelajaran pendekatan restorasi tersebut diketahui bahwa salah satu akar masalah penting terkait dengan restorasi kawasan perluasan TNGGP adalah masalah tercabutnya hak akses masyarakat atas SDL di dalam kawasan hutan.

Penguasaan lahan usaha tani dan ketergantungan masyarakat terhadap lahan hutan

Penguasaan lahan usaha tani oleh masyarakat petani penggarap meliputi kepemilikan lahan pertanian ataupun penguasaan lahan melalui sewa lahan dan sejenisnya di luar kawasan hutan dan penguasaan lahan garapan di dalam kawasan hutan. Kondisi luas penguasaan lahan usaha tani oleh masyarakat petani penggarap bervariasi mulai dari yang tidak punya lahan milik atau tidak punya penguasaan lahan (*landless*) sampai dengan yang mempunyai lahan milik atau menguasai lahan lebih dari cukup. Akses lahan berupa luas lahan garapan di dalam kawasan hutan juga bervariasi, dari petani penggarap yang mempunyai lahan garapan sangat luas sampai sangat sempit bahkan ada masyarakat petani penggarap yang pada dasarnya tidak mempunyai lahan garapan namun punya akses ke lahan garapan atas dasar sewa atau gadai lahan dari petani penggarap lain. Komponen penguasaan lahan ini dipengaruhi oleh faktor jenis lahan (sawah, tegal, atau kebun) dan faktor luas penguasaan lahan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa luas penguasaan lahan usaha tani di luar kawasan hutan (berupa sawah dan tegal) didominasi oleh petani penggarap dengan luas penguasaan lahan sempit dan sangat sempit bahkan *landless* (93%) dengan rincian kategori *landless* sebesar 50%, kategori sangat sempit sebesar hampir 23%, dan

kategori sempit sebesar 20%. Kategori cukup luas hampir 7%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat petani penggarap lahan sangat tergantung pada lahan garapan di dalam kawasan hutan. Luas penguasaan lahan garapan di dalam kawasan hutan (berupa sawah dan kebun) berperan penting dalam menambah kecukupan luas lahan usaha pertanian masyarakat guna mendapatkan tambahan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

Jika luas lahan garapan di dalam kawasan hutan diperhitungkan secara total sebagai luas lahan usaha tani yang dikuasai masyarakat, maka ditemukan bahwa 67 % petani penggarap mempunyai luas penguasaan lahan usaha tani dengan luas penguasaan sempit dan sangat sempit, dan kategori *landless* hanya 2% karena penguasaan lahan garapan melalui sewa lahan garapan pada petani penggarap lainnya. Perhitungan dengan memasukkan luas garapan hutan sebagai bagian luas penguasaan lahan usaha tani yang dimiliki petani penggarap ternyata menaikkan sebaran persentase petani penggarap dengan kategori penguasaan lahan '*cukup luas sampai luas*' sebesar 32%. Dengan demikian luas penguasaan lahan usaha tani di luar maupun di dalam kawasan hutan masih didominasi oleh para petani penggarap dengan kategori dan penguasaan lahan '*sempit, sangat sempit, dan bahkan landless*'. Fakta penguasaan lahan ini menunjukkan tingginya ketergantungan petani penggarap terhadap lahan di dalam kawasan hutan. Sebaran persentase responden menurut kategori luas penguasaan lahan di luar kawasan hutan tertuang dalam Lampiran 5 dan sebaran persentase responden menurut kategori total luas penguasaan lahan yang dimiliki petani penggarap di luar dan di dalam kawasan hutan tertuang dalam Lampiran 6.

Sifat hubungan penguasaan lahan dengan ketergantungan terhadap lahan garapan hutan adalah berbanding terbalik. Semakin sempit atau tidak punya penguasaan lahan di luar kawasan (*landless*) maka semakin tergantung dengan lahan hutan dan sebaliknya. Demikian pula sifat penguasaan lahan garapan di dalam kawasan hutan, menunjukkan bahwa semakin sempit lahan garapan dan atau penggarap tidak punya lahan garapan tetap (sebagai buruh tani, penyewa atau penggadai) sementara tidak juga memiliki lahan di luar kawasan, maka tingkat ketergantungan terhadap lahan garapan di dalam kawasan hutan adalah semakin tinggi. Selain itu tingkat ketergantungan terhadap lahan garapan di dalam kawasan hutan juga dipengaruhi oleh jenis lahan yaitu sawah atau tegal. Dengan demikian lahan di dalam kawasan hutan sangat penting dan sangat berarti bagi pemenuhan kebutuhan hidup petani penggarap. Konsekuensinya, mereka akan berusaha untuk tetap mempertahankan aksesnya atas lahan hutan. Hal ini diperkuat oleh penolakan dan rendahnya tingkat kesiapan mereka untuk meninggalkan lokasi garapan; dan di lain pihak menggambarkan tingkat beban atau tingkat gangguan terhadap pihak BBTNGGP.

Sumber Nafkah Petani Penggarap

Sumber nafkah atau jenis pekerjaan petani penggarap mencakup *pekerjaan pokok* dan *pekerjaan sampingan*. Pekerjaan pokok sebagai petani sawah atau peladang, dan pekerjaan sampingan bervariasi sesuai kapasitas petani penggarap. Sebagai petani yang pekerjaan pokoknya adalah *petani* yang sudah tergantung pada lahan usaha taninya. Jenis pekerjaan sampingan merupakan variabel penguat atau pelemah tingkat ketergantungan masyarakat petani penggarap terhadap lahan. Hal ini terkait dengan nilai tambah penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan sampingan tersebut. Semakin besar tambahan penghasilan yang diperoleh dari jenis pekerjaan sampingan, maka akan semakin mengurangi tingkat ketergantungan petani terhadap lahan garapan di dalam kawasan hutan. Digunakan asumsi bahwa jika jenis pekerjaan sampingan mempunyai tingkat nilai skor lebih tinggi daripada skor pekerjaan pokok, maka nilai skor sumber nafkah sampingan adalah rata-rata skor kedua jenis pekerjaan dimaksud. Namun jika pekerjaan sampingan mempunyai nilai skor lebih rendah daripada pekerjaan pokok atau sebagai buruh maka nilai skor sumber nafkah adalah mengikuti nilai skor buruh, karena sesungguhnya pekerjaan pokok petani penggarap tersebut adalah sebagai buruh tani.

Sebaran persentase responden menurut skor sumber nafkah keluarga tertuang dalam Lampiran 7. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada komponen sumber nafkah mengelompok ke dalam 2 (dua) kategori saja yaitu: kategori *Sangat Tergantung lahan* (83,33%), dan kategori *Cukup Tergantung lahan* (16,67%). Hal ini mengindikasikan bahwa 100 % jenis pekerjaan yang merupakan sumber nafkah tambahan bagi petani penggarap lahan masih bergantung pada lahan di dalam kawasan hutan dengan didominasi oleh petani penggarap yang masuk dalam kategori *Sangat Tergantung lahan*. Meskipun ditemukan adanya jenis pekerjaan sampingan yang tidak tergantung pada lahan, namun pekerjaan sampingan tersebut hanya sebagai variabel pelemah ketergantungan petani penggarap terhadap lahan, sedangkan pekerjaan pokok masyarakat adalah sebagai petani/peladang yang tergantung pada lahan garapan di dalam kawasan hutan.

Pekerjaan sampingan merupakan sumber tambahan penghasilan petani penggarap untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Variasi jenis sumber nafkah sampingan menunjukkan besar kecilnya nilai tambahan pendapatan. Oleh karena itu variasi jenis sumber nafkah sampingan akan mempengaruhi sifat ketergantungan masyarakat terhadap lahan garapan. Semakin besar nilai tambahan penghasilan yang diperoleh masyarakat dari suatu jenis pekerjaan sampingan tersebut maka akan berpengaruh pada semakin mengecilnya tingkat ketergantungan masyarakat atas lahan garapan di dalam kawasan hutan yang menjadi sumber penghidupannya. Tingginya tingkat ketergantungan jenis pekerjaan ini

berimplikasi pada semakin kuatnya dorongan untuk melakukan akses atas lahan kawasan hutan baik secara legal maupun illegal dan mempengaruhi tingkat tuntutan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mempertahankan atau menjamin keamanan aksesnya; dan di lain pihak menggambarkan tingkat beban atau tingkat gangguan terhadap pihak BBTNGGP.

Berbagai jenis pekerjaan sampingan yang dilakukan petani penggarap dapat mencerminkan keterkaitan hubungan ketergantungan pada lahan garapan. Semakin dekat keterkaitan jenis-jenis pekerjaan sampingan dengan bidang pertanian yang mampu dilakukan oleh petani penggarap akan berdampak pada semakin tingginya tingkat ketergantungan jenis pekerjaan tersebut pada lahan garapan di dalam kawasan hutan. Keterkaitan hubungan antara sumber nafkah yang merupakan gabungan pekerjaan pokok dan sampingan dengan ketergantungannya terhadap lahan hutan dapat dilihat dari besarnya persentase untuk masing-masing kategori.

Pekerjaan buruh serabutan dan pekerjaan sampingan lainnya seperti sebagai tenaga kerja di proyek pembangunan atau sebagai tukang ojek dan lain-lain memberikan nilai tambah penghasilan yang kecil, dan didominasi oleh petani penggarap yang pada dasarnya adalah buruh tani. Sedangkan jenis pekerjaan sampingan seperti pedagang sembako dan pedagang sayur memberikan nilai tambah penghasilan yang lebih besar. Jenis sumber nafkah sampingan merupakan variabel ketergantungan masyarakat terhadap lahan garapan karena mencerminkan keeratannya dengan kebutuhan lahan garapan di dalam kawasan hutan dan atau mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat ketergantungan petani penggarap terhadap lahan garapan di dalam kawasan hutan. Tingkat ketergantungan sumber nafkah terhadap lahan garapan di dalam kawasan hutan diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu kategori 'Sangat Tergantung pada lahan', kategori 'Tergantung pada lahan' dan kategori 'Cukup Tergantung pada lahan' adalah ditujukan untuk memberikan apresiasi terhadap petani penggarap dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk memberikan koreksi terhadap tingkat kuat lemahnya variabel sumber nafkah terhadap ketergantungannya pada lahan garapan di dalam hutan. Dengan demikian rata-rata skor pekerjaan pokok dan sampingan dapat dijadikan sebagai landasan analisis.

Tipe akses masyarakat dan pemanfaatan SDL

Berbeda dengan Prabowo (2010) yang membagi akses masyarakat kedalam 3 (tiga) tipe untuk kasus di TN Gunung Halimun Salak, yaitu tipe penggarapan lahan, tipe pemukiman, dan tipe gabungan penggarapan dan pemukiman, maka tujuan akses masyarakat di kawasan perluasan TNGGP hanya ada 2 (dua) tipe, yaitu tipe akses yang berupa penggarapan lahan kawasan hutan dan tipe akses pemanenan hasil hutan. Tipe akses penggarapan lahan ini masih dapat dikelompokkan lagi ke dalam sub-tipe berdasarkan pola pemanfaatan lahan

garapan atau pola usaha tani ataupun *base sistem agronomi*. Sub-tipe ini juga dapat mencerminkan variasi tingkat ketergantungannya terhadap lahan kawasan hutan.

Perbedaan pola usaha tani memberikan perbedaan nilai ekonomi usaha pertanian dan panjang pendeknya jangka waktu harapan untuk memetik hasil panen tanaman yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Artinya pola usaha tani ini mempengaruhi besar kecilnya derajat dorongan untuk melakukan akses atas lahan hutan, yang selanjutnya mempengaruhi tingkat tuntutan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mempertahankan atau menjamin keamanan aksesnya. Pada sisi lain pola usaha tani ini juga menggambarkan tingkat beban atau tingkat gangguan terhadap pihak BBTNGGP.

Hasil observasi lapangan dan wawancara menunjukkan keberagaman jenis komoditas tanaman yang dihasilkan dari pola usaha tani masyarakat. Paling tidak ada 5 (lima) pengelompokan jenis tanaman, yaitu: pangan pokok (padi, jagung, singkong), hortikultur (sayuran, pisang, kopi, palawija), pohon kayu untuk bangunan (jeunjing, afrika, mindi, tarikangin, mahoni, bambu), tanaman MPTs⁷ (nangka, alpukat, pete, jengkol, pala, cengkeh, durian) dan tanaman obat (kapol, jahe, honje, kumis-kucing, serai-wangi). Jenis tanaman tersebut juga dapat dikelompokkan lebih lanjut berdasarkan jangka waktu produksi komoditas tanaman, yaitu: tanaman semusim (sayuran, palawija, tanaman pangan pokok), tanaman tahunan (pisang, kopi, tanaman obat), dan tanaman perenial (tanaman kayu-kayuan, tanaman MPTs, bambu).

Berdasarkan base sistem agronomi maka pola pertanian petani penggarap dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) macam, yaitu: base sistem sayuran, base sistem padi dan kebun, base sistem singkong dan pisang, dan base sistem *agroforestry*. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa sistem pertanian penggarap di kawasan hutan wilayah Bidang PTN Cianjur didominasi oleh komoditas sayuran, dan sistem pertanian penggarap di kawasan hutan wilayah Bidang PTN Selabintana menunjukkan base sistem agronomi campuran yaitu sistem agronomi yang didominasi oleh komoditas padi dan kebun dengan singkong dan pisang. Adapun sistem pertanian penggarap di kawasan hutan wilayah Bidang PTN Bogor menunjukkan base sistem agronomi campuran yaitu sistem agronomi yang didominasi oleh komoditas padi dan kebun, singkong dan pisang, dan base sistem *agroforestry* (tanaman kayu-kayuan dan MPTs, dan tanaman obat).

Pengelompokan jenis tanaman yang diintegrasikan dengan tipologi masyarakat akan berguna dalam perumusan model restorasi dan strategi pelaksanaan kegiatan restorasi, antara lain terkait dengan aspek pilihan jenis tanaman, aspek pemanfaatan tanaman restorasi, dan pengaturan sistem pertanaman pada lokasi pelaksanaan kegiatan restorasi.

Pola akses masyarakat penggarap atas lahan hutan

Pandangan masyarakat yang merasa punya hak atas lahan garapan dan hak atas hasil tanaman mereka yang ada di kawasan perluasan TNGGP baik kayu maupun non kayu mendorong masyarakat untuk tetap mengupayakan dan mempertahankan akses atas lahan garapan yang ada di dalam kawasan hutan. Setidaknya ada dua alasan utama yang mendasari pemikiran masyarakat tersebut, yakni : (a) bahwa mereka sudah puluhan tahun menggarap lahan dengan memenuhi peraturan perundangan yang ada, dan (b) karena kepentingannya untuk mendapatkan sumber pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain itu rendahnya luas penguasaan lahan yang dimiliki oleh petani penggarap bahkan sebagian besar dari mereka tergolong kedalam kategori petani *landless* (petani yang tidak memiliki lahan) merupakan penyebab utama yang melatar belakangi akses masyarakat atas lahan hutan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pola usaha tani masyarakat yang tercermin dari pilihan jenis tanaman yang dikembangkan juga dipengaruhi oleh latar belakang tingkat perekonomian dan pandangan yang dimiliki. Petani penggarap yang berlatar belakang ekonomi cukup dan atau pandangan yang lebih jauh ke depan, kebanyakan memilih jenis tanaman kayu-kayuan dan tanaman MPTs untuk dikembangkan. Sedangkan petani miskin kebanyakan memilih jenis tanaman semusim dan atau tanaman pokok untuk dikembangkan. Hal ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan jangka pendek untuk menjamin ketersediaan pangan mereka (pertanian subsisten).

Secara normatif perubahan fungsi kawasan hutan dapat berarti adanya pembatasan bahkan penghilangan akses masyarakat atas SDA sehingga dapat memicu munculnya konflik. Dengan munculnya konflik kepentingan atas lahan garapan dan ketidakpastian jaminan hukum untuk ketetapan menggarap lahan maka sebagian dari petani penggarap sudah mulai beralih ke dalam perubahan pilihan jenis tanaman yang dikembangkan dalam usaha mempertahankan akses lahan garapan yaitu pengembangan jenis tanaman MPTs dan tanaman obat. Hal ini perlu mendapat perhatian dalam rangka penyusunan model dan strategi pelaksanaan kegiatan restorasi mengingat pilihan jenis tersebut dalam batas tertentu masih bisa ditolerir dalam rangka rehabilitasi. Hal yang perlu dicermati disini adalah terkait dengan status zone kawasan konservasi yang menjadi tempat lokasi akses mereka.

Dalam situasi konflik, masyarakat melakukan upaya-upaya untuk tetap memperoleh akses atas SDH di kawasan perluasan TNGGP, dan disisi lain petugas BBTNGGP masih memberikan toleransi pada petani penggarap lahan hutan. Didalam mengatasi situasi tersebut, petugas BBTNGGP selain melakukan pendekatan penegakan hukum, juga perlu diperhatikan pendekatan persuasif mengingat keberadaan petani

penggarap di dalam kawasan hutan tadinya memang legal (eks PHBM) disamping karena petani penggarap tersebut juga masih menggantungkan sumber penghidupannya dari lahan garapan hutan.

Dilihat dari pola mendapatkan akses terhadap lahan, hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh akses terhadap lahan melalui hubungan-hubungan sosial dengan petugas pengelola kawasan, dalam bentuk pembagian lahan atau alokasi lahan garapan baik saat kawasan masih dikelola oleh Perum Perhutani maupun dalam realisasi model pelaksanaan kegiatan restorasi (aspek yuridis formal). Selain itu juga melalui inisiatif petani penggarap dalam bentuk pemanfaatan lahan kosong pada waktu belum ada program formal dari pengelola kawasan saat kawasan masih dikelola oleh Perum Perhutani.

Dari pola akses lahan tersebut, fakta lapang menunjukkan membengkaknya jumlah petani penggarap lahan dan munculnya petani penggarap baru menggantikan penggarap lama. Kondisi ini dilatar belakangi oleh adanya kelembagaan lokal yang berkembang di dalam masyarakat khususnya berupa aturan main dalam hal memperoleh akses lahan garapan (aspek *bundle of power* dalam tinjauan teori akses), yakni petani penggarap lahan yang membuka kesempatan akses bagi penggarap baru untuk menggantikan penggarap lama. Dalam prakteknya masyarakat mendapatkan hak akses tersebut antara lain melalui: (1) mekanisme pembagian pewarisan hak penggarapan lahan kepada anak atau, (2) mekanisme *memulangkan garapan*. atau (3) mekanisme *atas nama* dimana 3 atau 4 orang penggarap baru mengaku sebagai buruh tani yang sekedar bekerja untuk seorang penggarap lama meskipun sebenarnya mereka menyewa atau membayar gadai lahan garapan. Tidak ada istilah membeli lahan garapan bagi masyarakat penggarap, yang ada adalah istilah *memulangkan garapan* yaitu bahwa seseorang dapat mengerjakan lahan garapan petani lain dengan memberikan sejumlah uang kompensasi sesuai kesepakatan sebagai pengganti beaya pembukaan dan pengolahan lahan dari hutan menjadi lahan pertanian. Kesepakatan jumlah nilai uang pengganti atau *uang pulangkan garapan* tergantung kepada letak lokasi lahan garapan dan kondisi lahan (kesuburan, jenis tutupan lahan, tingkat kemudahan usaha tani/pengolahan lahan), keamanan tanaman (frekuensi dan kualitas gangguan binatang liar/hama/manusia/peluang bencana alam).

Mekanisme bagaimana petani penggarap mendapatkan lahan garapan seperti disebutkan di atas menunjukkan pola akses masyarakat atas lahan di dalam kawasan hutan. Pola akses ini mempengaruhi tingkat tuntutan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mempertahankan atau menjamin keamanan aksesnya, disamping juga menggambarkan tingkat beban atau tingkat gangguan terhadap pihak Balai TNGGP.

KESIMPULAN

1. Dampak kebijakan perubahan fungsi kawasan hutan adalah penghilangan hak akses masyarakat atas pemanfaatan SDL atas kawasan perluasan TNGGP. Kebijakan pemerintah tersebut tidak berdasarkan pada realitas sosial di tingkat lapangan, sehingga memicu munculnya konflik pemanfaatan SDL atas kawasan perluasan TNGGP. Masyarakat menempuh jalur hubungan-hubungan sosial dengan petugas untuk tetap menjamin akses atas SDH yang menjadi gantungan hidup mereka.
2. Berdasarkan tujuan akses masyarakat di kawasan perluasan TNGGP terdapat 2 (dua) tipe akses yaitu tipe akses penggarapan lahan kawasan hutan dan tipe akses pemanenan hasil hutan. Tipe akses penggarapan lahan, dapat dikelompokkan lagi ke dalam sub-tipe bentuk pemanfaatan lahan garapan berdasarkan jenis komoditas, jangka waktu produksi komoditas, dan pola pertanian (*base sistem agronomi*). Sub tipe tersebut juga sekaligus mencerminkan variasi tingkat ketergantungan masyarakat terhadap lahan kawasan hutan.
3. Terdapat 5 macam pola akses masyarakat untuk mendapatkan akses lahan garapan, meliputi: pola pembagian lahan, pola inisiatif masyarakat secara sepihak, pola pewarisan, pola pemulangan lahan garapan, dan pola gadai/sewa.
4. Tipe akses, pola akses dan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap lahan (akibat ketiadaan dan atau tidak cukupnya luasan penguasaan lahan dan jenis pekerjaan) mempengaruhi tingkat tuntutan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mempertahankan atau menjamin keamanan aksesnya, sekaligus juga menggambarkan tingkat beban atau tingkat gangguan terhadap pihak BBTNGGP.
5. BBTNGGP menyelenggarakan program-program pemberdayaan masyarakat melalui adopsi pohon dan alokasi zona pemanfaatan tradisional dan merintis program model kampung konservasi (MKK) sebagai upaya penyelesaian konflik, dan melakukan penegakan hukum secara bertahap mulai dari preventif, persuasip sampai dengan langkah penindakan secara represif.
6. Masyarakat perlu dilibatkan sebagai bagian dari pelaku (subyek) pengelolaan SDA di kawasan perluasan dengan diberikan tanggung jawab lebih melalui alternatif pola manajemen kawasan konservasi ataupun model pelaksanaan restorasi dalam bentuk manajemen kolaboratif. Untuk itu perlu diatur kelembagaan yang dapat mengakomodasi pelibatan masyarakat dalam kegiatan restorasi atau pengelolaan kawasan konservasi sekaligus sebagai solusi atas permasalahan akses masyarakat atas SDA di kawasan perluasan TNGGP.

DAFTAR PUSTAKA

- Balai TNGGP. 2004. Pengkajian Zonasi TNGGP. Proyek Pemantapan Pengelolaan. BBTNGGP. Cianjur.
- Balai Besar TNGGP. 2009. Statistik Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2009. Kantor BBTNGGP. Cianjur, Jawa Barat.
- Basuni S. 2003. Inovasi Institusi untuk Meningkatkan Kinerja Daerah Penyangga Kawasan Konservasi.: Studi Kasus di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat. Disertasi. Program Pascasarjana IPB. Bogor.
- Basuni S. 2003. Kinerja Perlindungan Taman nasional Gunung Gede Pangrango. Jurnal Ilmiah Bidang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Lingkungan. Vol.VIII/Nomor 3, Desember 2003. Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan IPB.
- Departemen Kehutanan. 2009. Statistik Kehutanan Indonesia 2008. *Ed.*: Sub Direktorat Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan- Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan-Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Departemen Kehutanan-RI. Jakarta.
- DITJEN PHKA. 2007. UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya *dalam* Peraturan PerUndang-Undangan Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. DITJEN PHKA-KEMENHI=UT RI. Jakarta.
- Gaol LL. 2011. Analisis Luas Lahan Minimum Untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani Padi Sawah. Studi Kasus Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. [SKRIPSI]. Departemen agribisnis, Faperta,USU. Medan.
- Hasan I. 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Prabowo SA, S. Basuni, dan D. Suharjito. 2010. Konflik Tanpa Henti: Permukiman dalam Kawasan Taman Nasional Halimun Salak. JMHT Vol. XVI, (3): 137–142, Desember 2010.
- Ribot JC. and NL Peluso. 2003. A Theory of Access. *Rural Sociology* 68 (2), pp.153-181.
- Singarimbun M. and S Effendi. [Editor].1995. Metode Penelitian Survai. 2nd Ed. PT Pustaka LP3ES. Jakarta.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 174/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Penunjukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Cagar alam, Hutan Produksi tetap, Hutan Produksi Terbatas pada Kelompok Hutan Gunung Gede Pangrango Seluas 21.975 (Dua Puluh Satu ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Provinsi Jawa BaratMenjadi Taman Gunung Gede Pangrango.
- Umar H. 2002. Metode Riset Bisnis. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:**Lampiran 1.** Sebaran wilayah sampel, pertimbangan klusterisasi, dan jumlah responden petani penggarap

NO.	RESORT	DESA	JENIS LHN GRP	LUA S (Ha)	JUMLAH PETANI (KK)	KOMODIT AS	TEGAKAN	JUMLAH BLOK	JUMLAH RESPONDEN
PTN WILAYAH I CIANJUR									
1	GUNUNG PUTRI	Sukatani	Tegal	120.8 1	353	Sayuran dataran tgg	Alang-alang	4	10
2	SARONGGE	Ciputri	Kebun	104.0 2	271	Sayuran dataran tgg	Eukaliptus	3	10
PTN WILAYAH II SELABINTANA									
3	PASIR-HANTAP	Ginanjari	Kebun, sawah	143.0 1	289	singkong, pisang, jagung, buncis, padi	Damar, rasamala, alang-alang, kaliandra	14	10
4	NAGRAK	Cihanjawi	Kebun, sawah	229.0 8	674	Singkong, padi, buncis	Damar, kaya, songka	10	10
PTN WIL III BOGOR									
5	BODOGOL	Nanggerang	Tegal	23.5	50	Jagung, singkong, kacang	Damar, alang-alang	4	10
6	TAPOS	Bojongmurni	Tegal	10,95	37	Kapol, padi, palawija, sayuran	Damar, jeunjing, alang-alang	4	10

Sumber: BBTNGGP 2009 (diiolah)

Lampiran 2. Intensitas Sampling

NO.	RESORT	BLOK SAMPEL	JUMLAH KK PENGGARAP	JUMLAH RESPONDEN	INTENSITAS SAMPEL (%)
1	GUNUNGPUTRI	Lanbouw	70	10	14,29
2	SARONGGE	Pasir sarongge Girang	106	10	9,43
3	PASIRHANTAP	Lembur Pasir	35	10	28,57
4	NAGRAK	Sordog	88	10	11,36
5	BODOGOL	Bojong Lengit, Seuseupan	50	10	20,00
6	TAPOS	Pasir Benying	37	10	27,03
JUMLAH			386	60	15,54
RATA-RATA Intensitas sampling					16%
Kisaran intensitas Sampling					9-29 %

Lampiran 3. Kategori dan Skor kecukupan luas penguasaan lahan usaha tani

KISARAN LUAS PENGUASAAN LAHAN	JENIS LAHAN		SKOR	KATEGORI
	TEGAL	KEBUN HUTAN		
	(di luar kawasan hutan) (m ²)	(di dalam kawasan hutan) (m ²)		
0	0.	0.	5	<i>LANDLESS</i>
< 25%	< 2500	< 3750	4	Sangat Smpit
25-75%	2500-7499	3750-11249	3	Sempit
75-125 %	7500-12500	11250-18750	2	CUKUP
> 125%	>12500	> 18750	1	Luas

Keterangan: *LANDLESS* adalah petani penggarap yang tidak memiliki penguasaan lahan baik lahan milik atau sewa.

Lampiran 4. Kategori dan Skor ketergantungan jenis pekerjaan sampingan terhadap lahan hutan

JENIS PEKERJAAN SAMPINGAN	SKOR	KATEGORI	KETERANGAN
Buruh Tani*	5	Sangat Tergantung	*termasuk berbagai macam jenis pekerjaan buruh dengan nilai tambahan penghasilan yang kecil
Petani/Peladang	4	Tergantung	
Pedagang Musiman	3	Cukup Tergantung	
Pedagang Warung Sembako	2	Agak Tergantung	
Pedagang Hasil Bumi/ Tengkulak Sayur	1	Tidak Tergantung	

Lampiran 5. Sebaran persentase responden menurut kategori luas penguasaan lahan di luar kawasan per desa sampel

Desa	Persentase Responden (%)					Total
	Skor luas penguasaan lahan usaha tani					
	1	2	3	4	5	
Sukatani			1,67	8,33	6,67	16,67
Ciputri				5,00	11,67	16,67
Ginangjar		5,00	3,33	1,67	6,67	16,67
Cihanjawar		1,67	13,33	1,67		16,67
Nanggerang					16,67	16,67
Bojongmurni			1,67	6,67	8,33	16,67
Jumlah		6,67	20,00	23,33	50,00	100,00

Keterangan : 1 = Luas; 2= Cukup Luas; 3= Sempit; 4= Sangat Sempit; 5= *Landless*

Lampiran 6. Sebaran persentase responden berdasarkan kategori luas penguasaan lahan usaha tani di luar dan di dalam kawasan hutan per desa sampel

Desa	Persentase Responden (%)					Total
	Skor luas penguasaan lahan usaha tani					
	1	2	3	4	5	
Sukatani		1,67	5,00	10,00		16,67
Ciputri			8,33	8,33		16,67
Ginangjar	1,67	8,33	5,00	1,67		16,67
Cihanjawar	5,00	11,67				16,67
Nanggerang				16,67		16,67
Bojongmurni		3,33	3,33	8,33	1,67*	16,6a7
Jumlah	6,67	25,00	21,67	45,00	1,67	100,00

Keterangan : 1 = Luas; 2= Cukup Luas; 3= Sempit; 4= Sangat Sempit; 5= *Landless*

* *penguasaan lahan melalui sewa lahan garapan.*

Lampiran 7. Sebaran persentase responden menurut skor sumber nafkah keluarga per lokasi blok desa sampel

Desa	Persentase Responden (%)					Total	
	1	2	3	4	5		
Sukatani			8,33	3,33	5,00	16,67	Keterangan: 5 Sangat tergantung lahan 4 Tergantung lahan 3 Cukup Tergantung lahan 2 Agak Tergantung Lahan 1 Tidak Tergantung Lahan
Ciputri				1,67	15,00	16,67	
Ginangjar			8,33		8,33	16,67	
Cihanjavar				16,67		16,67	
Nanggerang					16,67	16,67	
Bojongmurni				6,67	10,00	16,67	
			16,67	28,34	55,00	100,01	